



► POLEMIK KEUANGAN

# PMI Jogja Diaudit, Tagihan Rp7,2 Miliar

**UMBULHARJO**—Palang Merah Indonesia (PMI) Jogja tengah mengaudit keuangannya yang bermasalah. Untuk sementara, ditemukan tagihan sebesar Rp7,2 miliar dari 28 vendor yang bekerja sama dengannya.

Triyo Handoko  
[triyo@harianjogja.com](mailto:triyo@harianjogja.com)

Permasalahan keuangan PMI Jogja tersebut mengemuka setelah Ketua PMI periode 2021-2026 Heroe Poerwadi yang terpilih mengundurkan diri. Sebelumnya, Heroe menyebut tagihan PMI Jogja sebesar Rp3 miliar. Pelaksana Ketua PMI Jogja Irjen Purn Haka Astana menjelaskan tengah mengaudit keuangan organisasinya sampai menemukan titik terang.

"Awal masalahnya karena sejak terpilih saya sebagai Wakil Ketua

- Sebelumnya, Heroe menyebut tagihan PMI Jogja sebesar Rp3 miliar.
- Haka menargetkan audit keuangan akan rampung pertengahan tahun ini.

dan Pak Heroe sebagai Ketua PMI Jogja tidak diberikan laporan keuangan kepengurusan 2016-2021. Kami sudah minta juga tidak diberi. Ternyata berjalannya waktu kami ditagih vendor. Kami kaget lalu saya menggantikan Pak Heroe yang mengundurkan diri," jelasnya, Kamis (23/3).

Haka menargetkan audit keuangan akan rampung pertengahan tahun ini. "Saya melanjutkan kepemimpinan Pak Heroe sejak Januari, target pribadi saya masalah ini rampung enam bulan," katanya.

Audit keuangan PMI Jogja, jelas Haka, dilakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Saya sudah

**Saya sudah minta bantuan BPKP dan mereka menyanggupi, sementara ini kami sudah mengumpulkan 28 vendor dan ternyata ada utang 7,2 miliar totalnya.**

Irjen Purn Haka Astana  
Pelaksana Ketua PMI Jogja

minta bantuan BPKP dan mereka menyanggupi, sementara ini kami sudah mengumpulkan 28 vendor dan ternyata ada utang 7,2 miliar totalnya," ujarnya.

Lantaran tidak memiliki laporan keuangan PMI Jogja 2016-2021, jelas Haka, audit dilakukan dengan

mengecek laporan vendor-vendor tersebut.

"Kami cek notanya, komunikasi dengan pengurus lama, dan semacamnya. Apakah betul utang tersebut harus bisa dibuktikan bersama termasuk anggaran-anggaran lainnya, memang ada inikasi tindakan pidana dalam masalah keuangan ini," kata Haka.

## Unsur Perdata

Namun, Haka tidak akan terburu-buru. Sebab, dimungkinkan ada unsur perdatanya juga. "Pokoknya kami harus ada bukti dulu, saya ini dulu berdinis di kepolisian ilmu saya pasti akan saya gunakan dan tidak buru-buru harus teliti," kata mantan Kapolda DIY tersebut.

Komunikasi dan klarifikasi pengurus PMI Jogja 2016-2021, lanjut Haka, belum dilakukan. "Kami menunggu hasil audit terlebih dahulu agar jelas, artinya kalau mau *ngomong*, [tunggu] datanya ada dulu dengan rinci jadi akan lebih enak komunikasinya," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. PMI Cab. Kota Jogja	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005